

KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2020

Oleh : Rifal Rinaldi Rospandi

Email : naldirinaldi99@gmail.com

Pembimbing : Adlin, S.Sos M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Corona Virus Disease 2019 which spread in Pekanbaru City made the Pekanbaru City Government issue a Regulatory Policy for handling and preventing the spread of Covid -19 as well as a Distributive Policy for the provision of basic needs for the people of Pekanbaru City during the PSBB period which was considered to be inappropriate.

The purpose of this study was to determine the impact of the Large-Scale Social Restriction (PSBB) policy in the context of accelerating the handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) in Pekanbaru City considering that Pekanbaru city is the capital city of Riau province. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques.

The results of the study show that the results of implementing this policy can suppress the spread and positive cases of Covid-19 in Pekanbaru City quite well. The Pekanbaru City Covid-19 Task Force, assisted by agencies and devices as well as volunteers, carried out various efforts, namely in the health sector, education sector, social sector, economic sector in meeting the basic needs of the community, peace and order sector, and social safety net sector.

Keywords: *Policy, Regulatory, Distributive, Covid 19*

Pendahuluan

Pembagian sembako bantuan COVID-19 yang menimbulkan persoalan di kota Pekanbaru, dan menuai sorotan Lembaga Adat Melayu (LAM) kota Pekanbaru. Otoritas adat tersebut menyerukan Pemerintah Kota (Pemko)

Pekanbaru untuk lebih cermat menelaah data penduduk terdampak COVID-19. Ketua LAM Kota Pekanbaru, Datuk Yose Saputra mengatakan, pendalaman data oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru diperlukan untuk mengurai amburadulnya pembagian sembako di kota Pekanbaru. Pasalnya

pembagian yang tidak tepat sasaran dengan sendirinya merusak citra kebijakan PSBB. "Kebijakan sudah bagus (PSBB), cuma pelaksana teknisnya mesti didalami atau dipelajari ulang oleh Dinas Sosial datanya. Dan itu melibatkan komponen yang ada di tingkat bawah," katanya kepada Gatra.com, Senin (27/4). Yose menambahkan saat ini ada kekecewaan di masyarakat, khususnya bagi warga yang telah menandatangani blanko di tingkat Rukun Tetangga (RT). Menurutnya, harmonisasi data antara dinas terkait dengan kecamatan dan kelurahan perlu dilakukan untuk mengurai persoalan. "Nah, asumsinya masyarakat itu sudah mendapat bantuan dengan sempurna. Sampai hari ini bantuan tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Perlu di data ulang segera," ujarnya. Diketahui, sebanyak 45 orang Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK) RT/RW se- Kelurahan Simpang Baru menampik pendistribusian bantuan sosial (Bansos) untuk warga yang terdampak Covid-19. Alasannya, jumlah penerima bantuan yang diusulkan Ketua RT dan RW di Kelurahan Simpang Baru berjumlah 2.500-an KK. Namun data penerima yang keluar dan mendapatkan bantuan dari Pemko hanya sebanyak 261 KK. Sementara itu menurut Juru Bicara Umum Covid-19 Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutahut, Pemko Pekanbaru pekan lalu sudah menyalurkan bantuan kepada 15.652 KK. Hanya saja menurut Juru Bicara Umum Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutahut lurah diminta memberikan laporan bila ada warga miskin yang tidak kebagian (Kurnia & Arista, Sembako Jadi Masalah, LAM Sarankan Pemko Pekanbaru Cek Data, 2020)

Pembagian bantuan sosial (Bansos) di tengah wabah virus Corona (COVID-19) di Pekanbaru terus menjadi

masalah. Pembagian dari Pemkot Pekanbaru banyak salah sasaran, termasuk penerima yang diketahui cukup berada karena memiliki mobil. "Hari ini ada pembagian sembako dari Pemko Pekanbaru. Tapi yang kami saksikan sendiri, pembagian ini sama sekali tidak tepat sasaran. Karena yang menerima ada yang memiliki mobil dengan rumah pribadi yang lumayan bagus. Artinya tidak tergolong orang miskin," kata Ketua Forum RT/RW Kelurahan Sidomulyo Timur, Joifikar kepada detikcom, Jumat (8/5/2020). Joi menjelaskan, bantuan yang diberikan itu berupa sembako, terdiri dari beras, telur dan minyak goreng. Hanya saja, pihak RT/RW bingung melihat data yang diberikan pihak Dinas Sosial Pemkot Pekanbaru. Sebab, data warga yang menerima dinilai tidak tepat sasaran (Tanjung, 2020).

Metode

Pendekatan Penelitian

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Prastowo, 2016).

Penelitian kualitatif ini juga tidak hanya mengungkapkan peristiwa yang nyata namun lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan peristiwa yang nyata namun lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Penelitian kualitatif ini juga digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama,*

penelitian ini menyajikan secara langsung dasar hubungan antara peneliti dan responden. *Kedua*, penelitian ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong, 2017).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Nazir metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moleong, 2017). Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat penyanderaan atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Syahza, 2014). Tipe penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengklasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial berdasarkan fakta yang ada dengan jalan mendeskripsikan dan menggambarkan secara terperinci yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini dimaksudkan untuk mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak yang kemudian dianalisis lebih lanjut. Format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, hmeringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, ataupun variabel tertentu. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisa

penerapan PSBB di Kota Pekanbaru melalui proses wawancara dengan informan-informan terkait, serta data-data lainnya yang diperoleh peneliti.

Penentuan Informan

1. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang diwawancarai dan diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2015). Fakta yang dibutuhkan meliputi kata-kata dan tindakan informan yang dapat memberikan data dan informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai pemberi informasi tentang Penerapan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tahun 2020.

Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penulisan ini antara lain:

- 1). Wali Kota Pekanbaru
 - 2). Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
 - 3). Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru.
 - 4). Kepolisian Resor Kota Pekanbaru
 - 5). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
 - 6). Kecamatan dan Kelurahan
 - 7). Masyarakat Pekanbaru
- #### 2. Teknik Penentuan Informan

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Informan ini di

butuhkan untuk mengetahui kondisi yang sesuai dengan fenomena penerapan PSBB di Kota Pekanbaru dalam percepatan penanganan Covid 19. 3)

Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) (Sangadji, 2010) yang merupakan suatu objek atau dokumen original materiil mentah dari pelaku yang disebut *firsthand information* (sumber pertama). Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi dinamakan data primer. Data atau sumber data primer antara lain meliputi data dan informasi tentang Penerapan PSBB Di Kota Pekanbaru Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Tahun 2020

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber yang pertama, namun sumber kedua, ketiga, dan seterusnya (Prastowo, 2016).¹Data sekunder disebut juga sebagai data pendukung atau data pelengkap yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada, artinya sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa surat kabar, website, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, dan referensi-referensi yang berkenaan.

Data sekunder, data yang diperoleh untuk melengkapi data primer, antara lain:

- 1) Literatur/buku-buku yang berkenaan sebagai penunjang.
- 2) Dokumen-dokumen berkaitan dengan

catatan tertulis, rekaman, gambar dan benda yang berkaitan dengan penerapan PSBB di Kota Pekanbaru.

Situs-situs internet atau website terkait.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh data dan informasi dari responden. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis meneliti pustaka tersebut karena penulis melihat PSBB ini dapat dilihat perkembangan dan datanya dari informasi reponden tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Menurut Sugiyono wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Prastowo, 2016). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan berbicara langsung dengan sumber informasi dengan mewawancarai informan secara langsung dan Tanya jawab mendalam tentang hal-hal yang relevan dengan penelitian, dengan maksud untuk menggali lebih jauh fenomena yang terjadi. Sedangkan pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka dengan mengedepankan kreatifitas dalam menggali informasi yang diinginkan.

2) Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Untuk memaparkan permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data kualitatif adalah upaya menggola data dengan mengumpulkan data, memilah-milah dan menemukan pola (*finding a patter*), menemukan apa yang penting dan apa yang diperlukan, menguji kembali (*verification*), dan memutuskan kesimpulan (*tentative conclusion*). Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu metode dalam mengolah data-data yang telah dikumpulkan dengan menganalisisnya sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan dengan analisa data kualitatif berupa reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Pada tahapan ini peneliti memilih dan memilah data yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian dari lapangan sebagai bahan mentah kemudian dirangkum lalu disusun supaya lebih sistematis, yang difokuskan pada pokok-pokok dari hasil- hasil penelitian untuk mempermudah penelitian. Kemudian data tersebut disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami sehingga pemahaman ini akan membantu menjawab pertanyaan baru berkaitan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data

Pada tahap ini data yang sudah dipilih dan dipilah selanjutnya disajikan agar mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan untuk selanjutnya

merencanakan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Peneliti melakukan pengumpulan data yang telah melalui proses reduksi untuk menggambar kejadian yang terjadi padasaat di lapangan. Catatan-catatan di lapangan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat untuk mempermudah pembaca memahami secara praktis. Tujuan penyajian data disini adalah untuk mempermudah dalam memahami hal yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal-hal yang telah dipahami tersebut. Data yang didapat kemudian dijelaskan hubungannya dengan data yang lain sehingga terbentuk suatu korelasi data terkait permasalahan penelitian.

c. Verifikasi data

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisis data, data yang telah disusun selanjutnya melalui proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Peneliti melakukan peninjauan terhadap catatan-catatan lapangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang ada dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori untuk menjawab tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan Kebijakan Regulatif

Dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai langkah seperti berikut :

1. Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DI Kota Pekanbaru dengan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 306 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 dan 1 April 2020 perihal menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020.
2. Melaksanakan rapat antara Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada tanggal 21 Maret 2020, membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Pekanbaru.
3. Melaksanakan rapat antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat pada tanggal 23 Maret 2020, membahas langkah-langkah yang perlu diambil terkait dengan pelaksanaan kegiatan keagamaan terkait pencegahan COVID- 19.
4. Penetapan status Kota Pekanbaru Tanggap Darurat COVID-19 melalui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 283 tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020.
5. Menerbitkan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 100/SETDATAPEM/86/III/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran/ Menghambat Upaya Pencegahan Penyebaran COVID- 19 di Kota Pekanbaru.
6. Himbuan bekerja dari rumah/ Work From Home (WFH) bagi ASN Kota Pekanbaru melalui Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 800/BKPSDMPKAP/640/2020 tanggal 19 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/693/2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/ Tempat Tinggal (WFH) bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
7. Memerintahkan kegiatan belajar mengajar bagi siswa/siswi mulai dari PAUD/TK sampai dengan Perguruan Tinggi agar dilaksanakan di rumah dengan menggunakan metode daring melalui Surat Edaran Walikota Pekanbaru Nomor: 100/Sektda-Tapem/661/2020 tanggal 23 Maret 2020
8. Pembatasan Kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau Kegiatan Mudik bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui SE Nomor 800/BKPSDM-PKAP/714/2020 Tanggal 1 April 2020.
9. Himbuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pekanbaru Nomor : 02/MUI-PBR/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran COVID-19 dengan BEKERJA DI RUMAH, BELAJAR DI RUMAH DAN BERIBADAH DI RUMAH.
10. Menghentikan sementara kegiatan Car Free Day (CFD) untuk menghindari berkumpulnya masyarakat, melalui surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Nomor : 551.21/MNI-MKL/III/2020/121 tanggal 15 Maret 2020.
11. Menginstruksikan kepada Camat dan Lurah se Kota Pekanbaru untuk Membentuk SISKAMLING TERPADU TANGGAP COVID-19 di setiap RW, melalui surat nomor : 100/Setda-Tapem/102/2020 tanggal 6 April 2020.
12. Tim Gugus Tugas melakukan sosialisasi ke pemukiman masyarakat bekerja sama dengan aparat kecamatan dan kelurahan serta dengan beberapa instansi terkait, menggunakan mobil patrol dan pengeras suara.

13. Melakukan sterilisasi melalui penyemprotan disinspektan ke berbagai tempat pelayanan umum dan perkantoran bekerjasama dengan Polri tanggal 1 April 2020 dan TNI AU pada tanggal 3 April 2020.
14. Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Pekanbaru yakni Rumah Sakit Daerah Madani melalui Keputusan Gubernur Riau Nomor 568/III/2020 Tanggal 16 Maret 2020 dan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 324 tahun 2020 Tanggal 9 April 2020 sebagai Rumas Sakit konsentrasi khusus melayani pasien COVID-19 dari Provinsi Riau dengan kapasitas 70 tempat tidur, yang saat ini telah merawat pasien positif COVID- 19 dari Kota Bangkinang Kabupaten Kampar (bagian dari daerah/wilayah Metropolitan Pekansikawan),
15. Melakukan konferensi pers setiap hari dalam rangka mensosialisasikan informasi perkembangan penyebaran COVID-19 dan untuk sinkronisasi data, yang dapat diakses melalui : ppc-19.pekanbaru.go.id
16. Menetapkan Rusunawa Rejosari sebagai Posko Siaga Rumah Sehat, untuk karantina selama 14 (empat belas) hari bagi TKI yang berasal/deportasi dari Malaysia dan masyarakat lainnya, 2 (dua) twin blok, dengan kapasitas 360 tempat tidur, melalui Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 301 Tahun 2020.
17. Bekerjasama dengan BUMN/BUMD dan badan usaha serta lembaga sosial partai politik melakukan sterilisasi melalui penyemprotan rumah Ibadah dan tempat pelayanan umum.
18. Mengambil kebijakan pengurangan pelayanan angkutan umum massal Transmetro Pekanbaru, baik jumlah armada maupun koridor yang dilayani.
19. Mengaktifkan Call Center 112 sebagai media penyampaian pengaduan dari masyarakat jika terjadi kasus yang memerlukan penanganan darurat.
20. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan terhadap masyarakat/pendatang yang masuk ke Kota Pekanbaru baik melalui jalur udara, jalur sungai dan jalur darat.

Dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap I, II, dan III ini, Satgas Covid19 melaksanakan tindakan dalam bidang kesehatan, bidang sosial, bidang ketentraman dan ketertiban.

Bidang Kesehatan

Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru, dilaksanakan upaya dengan semboyan TOS (Temukan, Obati, dan Sembuhkan), yaitu:

- 1) Terhadap pasien PDP yang masih dirawat di berbagai rumah sakit rujukan di Pekanbaru (sebanyak 118 orang), telah dilakukan uji SWAB, dan masih menunggu hasil uji dari laboratorium. Jika pasien yang hasil uji SWAB-nya Positif, dilakukan tracing terhadap anggota keluarga dan orang-orang yang pernah kontak dengan pasien, yang selanjutnya orang-orang tersebut akan ditetapkan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP).
- 2) Terhadap Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagai hasil tracing dimaksud, akan dilakukan karantina selama 14 (empat belas) hari, baik secara mandiri maupun oleh pemerintah. Untuk keperluan karantina, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan Rusunawa Rejosari sebagai Rumah Sehat tempat isolasi ODP dengan kapasitas 360 tempat tidur.
- 3) Setelah masa karantina berakhir, jika ODP tersebut tidak menunjukkan gejala Covid-19, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak tertular dan pemantauan dinyatakan selesai. Sedangkan terhadap ODP yang menunjukkan gejala Covid-19 ditingkatkan statusnya menjadi pasien Dalam

Pengawasan (PDP) dan dirawat di Rumah Sakit Rujukan. 4) Melakukan Rapid Test

Massal terhadap penduduk yang bermukim di wilayah zona merah.

Tabel 3.1

Perkembangan kasus ODP,PDP, dan Pasien Positif Pekanbaru, Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan PSBB Tahap I

No.	Uraian	Status Tanggal 23 Maret 2020	Status Tanggal 16 April 2020	Status Tanggal 30 April 2020
1.	Orang Dalam Pemantauan (ODP)	173	3.581	4.058
2.	Pasien Dalam Pengawasan (PDP)	22	116	290
3.	Pasien Positif	1	12	19
JUMLAH		196	3.709	4.357

Sumber : Satgas Covid19 Kota Pekanbaru

Berdasarkan dari tabel diatas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

kasus baik sebelum dilaksanakan PSBB maupun sudah diberlakukannya PSBB.

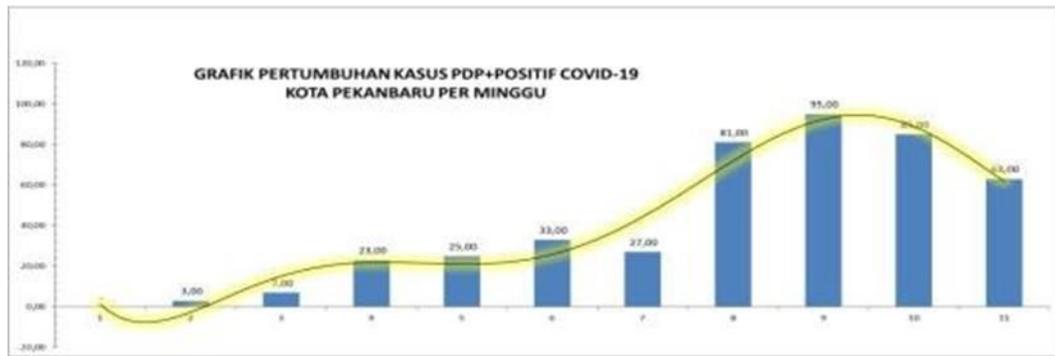
Tabel 3.2

Perkembangan Kasus Covid-19 Kota Pekanbaru Sampai Tanggal 14 Mei 2020

No.	Uraian	Pra PSBB Tanggal 3 Maret – 16 April 2020	PSBB Tahap I Tanggal 17 – 30 April 2020	PSBB Tahap II Tanggal 1 – 14 Mei 2020	Total
1.	Orang Dalam Pemantauan(ODP)	3.752	405	220	4.377
2.	Pasien Dalam Pengawasan(PDP)	123	179	129	431
3.	Pasien Positif	17	4	18	39
JUMLAH		3.892	588	367	4.847

Sumber : Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru

Grafik 3.2
Kasus PDP, Positif Covid-19 Sampai 14 Mei 2020



Sumber : Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil analisis tabel dan grafik di atas, menunjukkan bahwa trend pertumbuhan kasus mengalami penurunan. Apabila trend ini tetap berlanjut, diharapkan kasus terakhir kasus positif

dan/ atau PDP di Kota Pekanbaru terjadi pada minggu ketiga bulan Juni 2020.

Tabel 3.3
Perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru Sampai Tanggal 28 Mei 2020

No	Uraian	Pra PSBB Tanggal 3 Maret – 16 April 2020	PSBB Tahap I Tanggal 17 - 30 April 2020	PSBB Tahap II Tanggal 1 – 14 Mei 2020	PSBB Tahap III Tanggal 15 – 28 Mei 2020	Total	Keterangan
1.	Orang Dalam Pemantauan (ODP)	3.752	405	494	548	5.199	Hasil tracking/tracing (20 org) Dari Luar Kota/Riwayat Perjalanan (12 org) Bergejala dari fasyankes (21 org) Tanpa gejala dan rapid massal (438)
2.	Pasien Dalam Pengawasan (PDP)	123	176	145	96	540	Dari ODP (5 org) Riwayat Perjalanan (7 org) Ada Gejala, hasil dianoga Rumah Sakit (84 org)
3.	Pasien Positif	17	4	18	1	40	G-2 Dari ODP yang kontak dengan G-1 Positif (1 org)
	JUMLAH	3.892	585	657	645	5.779	

Sumber : Satgas Covid-19 Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil analisis tabel di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan kasus mengalami penurunan. Apabila ini tetap berlanjut, diharapkan kasus terakhir kasus positif dan/ atau PDP di Kota Pekanbaru terjadi pada minggu ketiga bulan Juni 2020.

Bidang Sosial

Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memberlakukan pengawasan terhadap aktifitas *Social Distancing* dan *Physical*

Distancing, yang dilakukan sebagai berikut:

1. Tempat Ibadah

Dalam pasal 11 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru, menyatakan bahwa selama pelaksanaan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan dirumah ibadah. Berdasarkan evaluasi selama masa

pelaksanaan PSBB, terdapat beberapa masjid dan mushalla yang masih melaksanakan shalat jamaah, baik shalat lima waktu, shalat jumat maupun shalat tarawih di masjid dan mushalla. Dari total 1.378 masjid dan mushalla yang ada di Kota Pekanbaru, sebelum bulan Ramadhan, sekitar 7,5 % masjid dan mushalla masih melaksanakan kegiatan beribadah berjamaah. Memasuki bulan Ramadhan, jumlah masjid dan mushalla yang melakukan kegiatan berjamaah meningkat menjadi 15%. Angka ini berpotensi meningkat jika tidak diambil langkah-langkah pembatasan lebih ketat.

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Agus Pramono menyatakan, pihaknya masih mendata ada 24 masjid yang masih terindikasi melakukan ibadah secara jamaah. “ Ada 24 masjid di Pekanbaru yang masih melakukan aktifitas ibadah ditengah PSBB berlangsung dan melakukan sholat tarawih berjamaah,” kata Agus. (Celoteh Riau, 2020)

2. Tempat Hiburan

Selama masa pelaksanaan PSBB, telah dilakukan penertiban terhadap tempat hiburan yang masih buka. Terhadap pelanggar ketentuan PSBB diambil tindakan tegas oleh tim penegak PSBB, bahkan ada kasus yang sampai ke tingkat penegakan hukum, dan telah dijatuhkan vonis. Pada tanggal 29 April 2020 Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan vonis terhadap terdakwa pelanggar PSBB yang terdiri dari 15 orang, dengan putusan : - Menghukum terdakwa VIII dengan denda sebesar Rp.

3.000.000,- atau subsider 2 bulan kurungan; - Menghukum terdakwa I, II, II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV dan terdakwa XV dengan denda sebesar Rp. 800.000,- atau subsider 1 bulan kurungan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru M. Jamil menegaskan, pelaku usaha tempat hiburan harus mematuhi aturan yang dibuat Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. "Harus mengikuti aturan pemerintah. Kalau yang memiliki izin (membangsal) tentu izinnya kita cabut," ujar Jamil, Selasa (14/4). Ditanya soal tempat karaoke Kezia99 yang sudah disegel Satpol PP, Jamil menyebut bahwa tempat itu sama sekali tidak memiliki izin. Tempat karaoke itu nekat buka saat larangan beroperasi untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19. "Mereka belum urus izin. Tempat sudah disegel dan mereka melakukan usahanya tanpa izin tentu menyalahi aturan dan tempat itu wajib ditutup. Apalagi dalam masa Covid-19," jelasnya. Kepala Bagian Humas Setdako Pekanbaru Mas Irba H. Sulaiman mengatakan, tempat hiburan sejenis tidak boleh beroperasi selama PSBB diberlakukan. "Tempat hiburan dilarang beroperasi," tegasnya. (Pekanbaru.go.id, 2020)

3. Pasar dan Pusat Perbelanjaan

Selama masa pelaksanaan PSBB, pasar tradisional di Kota Pekanbaru tetap beroperasi dengan pembatasan waktu pukul 05.00 – 15.00 Wib dengan persyaratan harus menerapkan protokol kesehatan. Dari hasil evaluasi, rata-rata pasar

tradisional sudah menyediakan peralatan cuci tangan di pintu masuk pasar, namun masih terdapat beberapa protokol kesehatan yang belum maksimal dilaksanakan, antara lain :

- a) Penggunaan masker oleh pengunjung pasar masih kurang;
- b) Pembatasan jarak bagi pengunjung pasar belum terlaksana dengan baik, karena ketersediaan ruang gerak. Untuk pusat perbelanjaan/Mall juga beroperasi berbatas waktu dari pukul 11.00 – 18.00 Wib. Pihak penyelenggara pasar menyediakan masker, tempat cuci tangan dan pengawasan kerumunan.

“Sejumlah Mal besar seperti SKA, Mal Pekanbaru dipadati pengunjung tanpa mepedulikan physical distancing yang merupakan anjuran pemerintah untuk menghindari terpapar Virus Corona (Covid- 19). Rata-rata, pengunjung menyerbu bahan makanan atau kue lebaran dan baju lebaran.Tak heran jika masyarakat mempertanyakan kebijakan PSBB itu. Padahal, sebulan yang lalu pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan imbauan kepada mal dan pusat perbelanjaan untuk membatasi jam operasional untuk menahan laju penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Ibukota Provinsi Riau”, (halloriau.com,2020)

Bidang Ketentraman dan Ketertiban

Selama masa pelaksanaan PSBB Kota Pekanbaru, tim penegak PSBB Kota Pekanbaru, yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Dishub, dan Satpol PP melakukan pengamanan dan penertiban terhadap mobilitas kendaraan di jalan raya. Lokasi

pemantauan dilaksanakan pada 5 lokasi check point, yakni :

- 1) Pos Jalan Garuda Sakti Ujung Km. 4
- 2) Pos Jalan Yos Sudarso
- 3) Pos Jalan Lintas Timur Km. 22
- 4) Pos Jl. Kaharuddin Nasution/ Jl. Kubang Raya
- 5) Pos Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang

Waktu pemantauan dan penertiban dilaksanakan selama 24 jam dalam waktu satu hari dengan melibatkan personil khusus bidang mobilitas kendaraan di jalan raya dan tempat usaha setiap hari berjumlah 1.175 personil yang terdiri dari :

- 1) Personil Polri (Polda dan Polresta) : 806 orang
- 2) Personil TNI (Kodim 0301) : 100 orang
- 3) Personil Dishub Kota Pekanbaru : 150 orang
- 4) Personil Satpol PP Kota Pekanbaru : 131 orang
- 5) Personil Dishub Provinsi Riau : 5 orang
- 6) Personil BPTD Wilayah IV, Kemenhub : 20 orang

Pemantauan di pos perbatasan dilakukan di lima titik. Yakni pertama di depan U-turn Pusat Kerajinan Dekranasda Kota Pekanbaru (Lintas Barat). Kedua di depan Mesjid Baituhrrahman (Pantai Cermin). Ketiga di depan Polsek Rumbai (Lintas Utara). Keempat, di depan SPBU Simpang Pesantren Pasir Putih (Lintas Timur). Dan terakhir di Simpang Kuburan Teratak Buluh (Lintas Selatan). Demikian dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Agus Pramono kepada RiauPos.co, Senin (18/5). "Kita lakukan pengecekan terhadap masyarakat agar menggunakan masker dan pemeriksaan jumlah personil di mobil maupun sepeda motor," katanya.

Sebelumnya, Ahad (17/5) malam tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Pekanbaru juga melaksanakan patroli malam gabungan. "Mulai 21.00 WIB sampai 24.00 WIB dilakukan penertiban PSBB terhadap pedagang serta kendaraan sepeda motor dan Mobil. Ini di Jalan Sudirman, Tuanku Tambusai, Paus dan Arifin Achmad," tutupnya. (Nurman, 2020)

Pembatasan Kegiatan Belajar di Sekolah

Seperti halnya dalam pelaksanaan PSBB Tahap I dan PSBB Tahap II, selama masa pelaksanaan PSBB Tahap III, selain yang dikecualikan, kegiatan belajar sudah mengikuti ketentuan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 375 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Tahap Kedua Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kota Pekanbaru, yakni kegiatan belajar dilakukan dari rumah dengan metode daring.

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru telah mengeluarkan suratedaran tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran 2020/2021 di masa pandemi Virus Corona atau Covid-19. "Iya kita sudah keluarkan surat edaran. Saat ini masih PJJ namanya, pembelajaran jarak jauh," kata Pelaksana tugas Kepala Disdik Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas, Sabtu (11/7). Kata dia, hal itu berdasarkan keputusan empat menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Ia menyebut, PJJ yang dimulai pada 13 Juli 2020 nanti dilaksanakan sampai waktu yang belum ditentukan. "Belum ada petunjuk teknis (pusat). Makanya di dalam surat edaran itu kami buat sampai waktu yang belum ditentukan," jelasnya. Di dalam surat itu

juga, masa pengenalan lingkungan juga dilaksanakan dalam jaringan (Daring) atau online. "Bagi peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar (SD) dan kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP), pengenalan lingkungan dilaksanakan secara Daring," jelasnya. Sekolah juga diminta menyiapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang disusun dan dilaksanakan satuan pendidikan dengan memperhatikan kondisi masing-masing di masa pandemi Covid. Kepala sekolah diminta selalu memberi pengawasan. "Kepala sekolah wajib melakukan pemantauan terhadap aktivitas guru, tenaga pendidikan dan peserta didik dalam pelaksanaan PJJ agar kebijakan ini berdampak positif sebagai upaya pencegahan penularan Covid 19," jelasnya. (Pekanbaru.go.id, 2020)

Kebijakan Distributif

Melalui kebijakan RW Siaga Covid cadangan pangan warga harus menjadi perhatian jika memasuki masa PSBB atau karantina wilayah. Maka sesuai Undang – undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, masyarakat berhak mengatur atau mempersiapkan cadangan pangan masyarakat. Lumbung Pangan warga dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Menghidupkan Rumah Pangan Madani di setiap RW sebagai sentra distribusi kebutuhan pangan warga
- Melakukan kemitraan bisnis dengan dunia usaha untuk kecukupan kebutuhan pangan warga
- Menyalurkan bantuan dari pemerintah untuk program operasi pasar, bantuan pangan dan beras murah
- Menyiapkan cadangan pangan warga jika memasuki PSBB atau karantina wilayah.

Pak Yunaldi dari Satgas Covid juga menambahkan

“Kebutuhan dasar pangan masyarakat selalu kita upayakan tetap

terbantu, kita juga meminta bantu kepada kementerian sosial pusat untuk meminta bantuan sembako. Kita juga ada bantuan dari relawan maupun donator untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita” (Wawancara 3 Juni 2021)

Dalam membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah memberikan Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net), terhadap :

Penerima Bantuan Kementerian Sosial

Masyarakat penerima bantuan pemerintah yang termasuk dalam Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 35.998 KK, yang terdiri dari :

- a. Kelompok Masyarakat Miskin sebanyak 12.785 KK (PKH + BPNT);
- b. Kelompok Masyarakat Hampir Miskin sebanyak 3.769 KK (BPNT);
- c. Kelompok Masyarakat Rentan Miskin sebanyak 16.956 KK (BLT COVID-19).

Masyarakat Terdampak Covid-19

- a. Selama pelaksanaan PSBB Tahap I dan Tahap II Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyalurkan Bantuan Sosial Sembako sebanyak 45.625 KK, yang terdiri dari :
 1. Sembako (CBP + Lauk pauk), sumber dana Kemensos + APBD Kota Pekanbaru sebanyak 15.625 KK;
 2. Sembako (Beras + Lauk Pauk), sumber dana APBD Kota Pekanbaru, sebanyak 30.000 KK.
- b. Dalam pelaksanaan PSBB Tahap III, dilakukan penyaluran Sembako Tahap II sebanyak 60.625 KK, yang bersumber dari APBD Kota Pekanbaru, yang ditujukan kepada :
 1. Penerima Sembako Tahap I sebanyak 45.625 KK;
 2. Usulan Baru Penerima Sembako sebanyak 15.000 KK, untuk petugas layanan lapangan 5.000 KK dan usulan RT/RW sebanyak 10.000 KK.
- c. Pemerintah Kota Pekanbaru juga

mengusulkan bantuan kepada Pemerintah Provinsi Riau sebanyak 32,134 KK, yang terdiri dari :

1. PKH Murni sebanyak 1.560 KK;
2. BSP Murni sebanyak 3.769 KK;
3. Masyarakat Terdampak sebanyak 24,685 KK (Penerima Bansos Tahap I);
4. Masyarakat yang telah mengusulkan melalui online sebanyak 2.120 KK.

PSBB Pekanbaru diperpanjang meskipun bantuan sosial terhadap masyarakat miskin dan rawan miskin karena terdampak virus corona atau covid-19 masih menyisakan masalah. Puluhan RT dan RW menolak bantuan dalam bentuk sembako, bukan bantuan tunai langsung (BLT), karena pendataan mereka tak dipakai. RT dan RW memilih meninggalkan bantuan PSBB di kantor kelurahan setempat. Mereka takut menjadi sasaran warga terdampak karena tidak kebagian jatah, apalagi dengan jumlah bantuan itu (15 ribu KK) hanya 4 kepala keluarga yang dapat di setiap RT. Atas kejadian ini, Wali Kota Pekanbaru Firdaus berjanji menuntaskan permasalahan ini. Dia menyebut warga yang tidak terdata akan diberi bantuan susulan. "Bantuan masih ada, yang belum tuntas kemarin nanti dibantu," kata Firdaus kepada wartawan. Firdaus mengakui pendataan masyarakat terdampak untuk bantuan berikutnya belum tuntas. Pihaknya masih memverifikasi berdasarkan data yang diserahkan RT dan RW ke kelurahan. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemko Pekanbaru Chairani membantah tidak menggunakan data RT dan RW dalam penyaluran bantuan sembako. Dia menyebut dinas sosial menggunakan data dari kelurahan. "Data kelurahan itu dari RT dan RW," kata Chairani. Diapun membantah isu yang beredar di masyarakat

bahwa Pemko Pekanbaru tidak mengeluarkan uang sepersen pun dalam bantuan ini. Ada yang menyebut beras itu dari Bulog sebagai beras pencadangan dan lauk pauk seperti telur sert sarden dari badan amal zakat nasional. (Syukur, PSBB Pekanbaru Diperpanjang, Bantuan Masih Misteri, 2020)

"Hari ini ada pembagian sembako dari Pemko Pekanbaru. Tapi yang kami saksikan sendiri, pembagian ini sama sekali tidak tepat sasaran. Karena yang menerima ada yang memiliki mobil dengan rumah pribadi yang lumayan bagus. Artinya tidak tergolong orang miskin," kata Ketua Forum RT/RW Kelurahan Sidomulyo Timur, Joifikar kepada detikcom, Jumat (8/5/2020). Joi menjelaskan, bantuan yang diberikan itu berupa sembako, terdiri dari beras, telur dan minyak goreng. Hanya saja, pihak RT/RW bingung melihat data yang diberikan pihak Dinas Sosial Pemkot Pekanbaru. Sebab, data warga yang menerima dinilai tidak tepat sasaran. Warga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak masuk dalam daftar penerima bansos. Seperti para pekerja kebun sayur, janda miskin, pekerja harian yang tak lagi bisa bekerja. Padahal umumnya mereka hidup di rumah kontrak yang sangat sederhana berdinding papan. (Tanjung, Ada Warga Bermobil Didata Pemkot, Forum RT di Pekanbaru Tolak Bagikan Bansos, 2020)

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Di Kota Pekanbaru Tahun 2020, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut.

1. Berdasarkan dari data laporan

PSBB Kota Pekanbaru dapat diambil kesimpulan pada tahap 1 PSBB terjadi lonjakan kasus positif, namun seiring berjalannya PSBB tahap 2 dan 3 sudah mengalami banyak penurunan kasus pantauan dan kasus pasien positif.

2. Dalam kebijakan regulatif pemerintah Kota Pekanbaru dalam PSBB ini melibatkan banyak instansi yang terlibat, namun masih banyak terdapat masyarakat yang melanggar. Masih rendahnya sikap disiplin dan patuhnya masyarakat dalam mematuhi kebijakan PSBB.

Dalam menjalankan kebijakan distributif yang diterapkan bahwa penyaluran bantuan masyarakat terdampak covid tidak tepat sasaran, dikarenakan tidak sinkronnya data dari pemerintah

Daftar Pustaka

- FitzGerald, C., O'Malley, E., & Broin, D. O. (2019). Policy succes/policy failure : A Framework For Understanding Policy Choices. *Jurnal Internasional Sciendo*, 67(2), 1-24.
- Hairi, P. J. (2020, April). Implikasi Hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Pencegahan Covid 19. *Info Singkat*, 12(7), 1-5.
- halloriau.com. (2020, Mei 18). *Tanpa Perhatikan Physical Distancing, Mall di Pekanbaru Ramai Pengunjung Saat PSBB Berlangsung*. Retrieved from halloriau.com: <https://www.halloriau.com/read-pekanbaru-130055-2020-05-18-tanpa-perhatikan-physical-distancing-mal-di-pekanbaru-ramai-pengunjung-saat-psbb-berlangsung.html>
- Hendriyani, E. (2015). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan MODERAT*, 657-665.
- Kurnia, F., & Arista, B. (2020, April 27). *Sembako Jadi Masalah, LAM Sarankan Pemko Pekanbaru Cek Data*. Retrieved from Gatra.com: <https://www.gatra.com/detail/news/477010/kebencanaan/sembako-jadi-masalah-lam-sarankan-pemko-pekanbaru-cek-data>
- Kurnia, F., & Haryadi, R. (2020, Mei 25). *Gatra.com*. Retrieved from Kota Pekanbaru Tetap Ramai dan Sibuk Meski PSBB: <https://www.gatra.com/detail/news/479873/kesehatan/kota-pekanbaru-tetap-ramai-dan-sibuk-meskipun-psbb>
- Mahdi, M., Mudatsir, & Nasaruddin. (2014, November). Kesiapsiagaan Perawat Dalam Menghadapi Wabah Flu Burung Di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*, 1(2), 22-26.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, E., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramadani, T. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Komunikasi Publik Di Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. *Jurnal Borneo Administrator*, 1-5.
- Riau, S. (2020, April 16). *Ini Alasan Wali Kota Pekanbaru Berlakukan PSBB Hanya Jam Malam Saja*. Retrieved Oktober 17, 2020, from Kumparan.com: <https://kumparan.com/selasarriau/ini-alasan-wali-kota-pekanbaru-berlakukan-psbb-hanya-jam-malam-saja-1tEgqUITzoT/full>
- Riaupos.co. (2020, April 24). *Pengamat : Pemko Latah, PSBB Berlaku Bantuan Belum Disalurkan*. Retrieved from Riaupos.co: <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/24/04/2020/230076/pengamat-pemko-latah-psbb-berlaku-bantuan-belum-disalurkan.html>

- Riaupos.co. (2020, April 7). *Tak Patuhi Social Distancing, Tangkap!* Retrieved from Riaupos.co: <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/07/04/2020/228823/tak-patuhi-social-distancing-tangkap.html>
- Sabdaningtyas, L. (2018). *Model Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD*. Lampung: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan.
- Sangadji, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Syahza, A. (2014). *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press.
- Syukur, M. (2020, Mei 1). *PSBB Pekanbaru Diperpanjang, Bantuan Masih Misteri*. Retrieved from Liputan6. com: <https://www.liputan6.com/regional/read/4242010/psbb-pekanbaru-diperpanjang-bantuan-masih-misteri>
- Tanjung, C. A. (2020, Mei 8). *Ada Warga Bermobil di Data Pemkot, Forum RT di Pekanbaru Tolak Bagikan Bansos*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-5006967/ada-warga-bermobil-di-data-pemkot-forum-rt-di-pekanbaru-tolak-bagikan-bansos>
- Umar, Z. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Publik Di Daerah. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2-5.
- Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.